

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan T.A 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN / REALISASI				TAHUN 2022	
		2018	2019	2020	2021	TARGET	REALISASI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (%)	86,82	87,24	89,14	88,52	96	86,65
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	100	99,47	99,5	99,60	98	99,71
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	99,83	97,76	98,2	98,40	98	98,02
4	Pelayanan Kesehatan Balita (%)	85,15	86,02	77,93	79,68	94	84,32
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	99	92,36	56,03	79,33	88	88,09
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif (%)	5,90	13,7	19,92	33,95	80	51,46
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%)	14,96	61,33	33,53	46,22	50	61,72
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	19,86	18,39	25,63	38,60	100	40,35
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus(%)	12,30	90,00	72,64	70,39	100	84,98
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat(%)	100	56,78	46,44	52,85	100	64,65
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB(%)	100	41,35	37,87	33,85	90	61,90
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV(%)	62,36	90,98	73,87	71,08	85	90,12
13	AKB/1000 KLH*	10,07	9,5	9,51	9,45	11,5	9,2
14	Kasus Kematian Ibu*	30	37	62	105	28	50
15	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar	77,14	82,27	86,69	87,45	80	87,55

Keterangan :
* = indikator negatif

Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, terdapat 14 indikator yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, mengalami kenaikan di setiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022 terealisasi 86,65% dari target 96%. Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan ibu hamil adalah cakupan kunjungan ke 4 (K4).
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mengalami kenaikan capaian di setiap tahunnya, pada tahun 2022 terealisasi 99,71% dari target 98%. Penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Capaian Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir mengalami trend naik turun, pada tahun 2022 terealisasi 98,02% dari target 98%. Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3).
4. Pelayanan Kesehatan Balita mengalami kenaikan capaian di tahun 2018 dan 2019, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022 terealisasi 84,32% dari target 94%. Faktor yang mempengaruhi belum mencapai target antara lain karena masih rendahnya kesadaran para ibu untuk membawa anak balitanya ke Posyandu terutama yang berusia 3 sampai 5 tahun disebabkan masih ada yang takut adanya covid-19, dan mobilitas keluarga ke luar kota yang cukup tinggi (urban).
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar mengalami penurunan capaian di tahun 2019 dan 2020 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dan 2022. Penurunan capaian disebabkan karena disebabkan karena adanya kebijakan terkait penanggulangan wabah *covid 19* dengan ditiadakannya pembelajaran tatap muka di semua jenjang pendidikan, hal ini menyebabkan kegiatan penjangkaran di setiap sekolah sangat terbatas. Pada tahun 2022 terealisasi 88,09% dari target 88%.
6. Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif di tahun 2022 terealisasi 51,46% dari target 80%. Berdasarkan Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa semua penduduk usia 15 – 59 tahun harus diperiksa sebagai berikut:
 - a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.
 - b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
 - c. Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah.
 - d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
 - e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan.
 - f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran.
 - g. Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30 – 59 tahun.
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut di tahun 2022 terealisasi 61,72% dari target 50%.
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi mengalami kenaikan capaian di setiap tahunnya, pada tahun 2022 terealisasi 40,35% dari target 100%, hal tersebut disebabkan antara lain Setengah tahun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, Penderita takut untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan; Jumlah sasaran yang besar, sehingga SDM kesehatan terutama dokter dan perawat belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sesuai standard; serta Kesadaran masyarakat terutama keluarga penderita yang masih rendah untuk mendukung penderita untuk mau melaksanakan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Solusi yang dilaksanakan adalah KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada keluarga pasien saat melakukan kunjungan.
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus tahun 2022 terealisasi 84,98% dari target 100%, dukungan logistik kesehatan yang tersedia sejumlah BMHP (Bahan Medis Habis

- Pakai) strip gula darah = 688.000 buah dengan jumlah SDM yaitu Pemegang program di puskesmas sebanyak 38 orang dan Kader terlatih sebanyak 1.372 orang.
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat terealisasi 64,65% dari target 100%. Tidak tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat disebabkan karena beberapa hal, yaitu : koordinasi lintas sektor terkait kurang maksimal dan masih adanya stigma dari masyarakat terhadap ODGJ membuat masyarakat enggan melaporkan ke fasilitas kesehatan.
 11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (%) terealisasi 61,90% dari target 90%. Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan orang dengan TB adalah angka keberhasilan pengobatan TB.
 12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV terealisasi 90,12% dari target 85%. Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah penemuan orang yang terinfeksi HIV/AIDS.
 13. AKB/1.000 KLH terealisasi 9,2 dari target 11,5.
 14. Kasus Kematian Ibu di tahun 2022 sejumlah 50 kasus dari target 28 kasus. Hal tersebut antara lain disebabkan kualitas ANC (*Antenatal Care*) belum optimal, pemantauan ibu hamil dan nifas belum optimal, masih kurangnya kepatuhan petugas dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta belum maksimalnya pembinaan puskesmas ke praktik mandiri bidan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, terdapat 1 indikator yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar mengalami kenaikan di setiap tahunnya, pada tahun 2022 terealisasi 87,55% dari target 80%.

Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan T.A 2022

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	TAHUN / REALISASI				TAHUN 2022	
			2018	2019	2020	2021	TARGET	REALISASI
1	Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (%)*	4.75	3,22	3,28	1,03	1.004	3	1,10
2	Penurunan prevalensi stunting (%)*	32.7	7,66	11,45	11,54	11,42	27	10,53
3	Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%)	80	54,62	79,29	81,57	64,98	85	85,72
4	Cakupan pelayanan balita (D/S) (%)	85	75,82	78,08	69,64	73,7	90	76,51
5	Cakupan Keluarga sadar gizi (%)	65	66,96	64,03	75,53	78,49	80	60,07
6	Penurunan prevalensi anak gizi buruk (%)*	0.7	0,10	0,16	0,29	0,40	0,45	0,38
7	Cakupan desa baik garam (%)	98	83,5	82,5	83,84	73,3	100	65,3
8	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan balita naik BB (N/D) (%)	70	84,84	84,18	83,84	82,45	80	88,51
10	Bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) (%)	50	84,8	85,69	77,5	84,43	55	84,26
11	Remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) (%)	25	54,77	47,94	18,88	56,54	30	67,59
12	Cakupan bayi dapat Vitamin A (%)	90	98,04	99,1	98,9	98,48	95	99,92
13	Cakupan balita dapat Vitamin A (%)	90	97,43	97,4	97,4	96,56	95	98,25
14	Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42 (%)	85	99,69	98,1	99,48	99,48	95	99,83
15	Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium (%)	93	84,18	90,1	95,14	95	100	94,7
16	Pesentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T) /ANC Terpadu (%)	50	86,82	87,2	89,14	91	75	91,8
17	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)	75	86,82	87,2	99,5	99,6	80	91,8
18	Prosentase Cakupan K1 (%)	100	100	100	100	100	100	100
19	Prosentase Cakupan K4 (%)	86	86,82	87,2	89,14	88,52	90	88,65
20	Prosentase KB Aktif (%)	52	68	81,6	84,9	89,4	74	80,9
21	Prosentase Cakupan KF 1 (%)	70	100	98,1	99,49	99,75	75	91,5
22	Prosentase Cakupan KF 3 (%)	55	98,09	97,8	96,79	96,29	70	92
23	Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (%)	70	99,36	99,47	99,5	99,6	80	99,71
24	Prosentase persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	90	99,93	99,9	99,91	99,95	95	99,57

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	TAHUN / REALISASI				TAHUN 2022	
			2018	2019	2020	2021	TARGET	REALISASI
25	Prosentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (%)	85	99,98	100	99,8	100	95	100
26	Prosentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%)	100	100	100	100	100	100	100
27	Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (%)	30	46,6	44,5	45,1	44,5	50	48,9
28	Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (%)	80	100	100	100	100	90	100
29	Prosentase kunjungan neonatal pertama KN1 (%)	75	99,83	99,4	100	100	90	95,6
30	Prosentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (%)	85	97,93	97,6	98,2	98,67	90	98,02
31	Prosentase Neonatal Komplikasi tertangani (%)	90	99,92	100	97,5	100	95	100
32	Prosentase kunjungan bayi (%)	90	97,63	92,72	93,5	90,2	95	95,16
33	Prosentase Bayi BBLR tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	100
34	Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	85	85,15	86,02	77,9	74,41	90	84,32
35	Prosentase Balita di MTBS (%)	60	100	98,16	96,26	100	80	99,76
36	Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut (%)	30	49,08	62,75	32,71	46,22	60	61,72
37	Prosentase PMT (Pemberian makanan Tambahan) Lansia (%)	10	100	100	20,48	98,5	50	100
38	Prosentase Posyandu Lansia (%)	50	100	100	20,48	98,5	75	100
39	Jumlah puskesmas Santun Lansia (%)	100	100	100	100	100	100	100
40	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	68	100	100	100	100	84	100
41	presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (%)	-	-	100	97,36	97,36	85	97,36
42	Cakupan Akses Jamban Sehat (%)	69,94	78,49	86,06	94,21	100	100	100
43	Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	20	50	100	100	100	100	100
44	Presentase sarana air minum masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan (Kepala Keluarga)	74	85,33	83,49	95,76	95,76	100	100
45	Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan (presentase)	-	-	53,44	76,44	74,75	67	74,75
46	AFP Rate (> 2 per 100.000 penduduk < 15 tahun)	2.75	4	3,33	2	2,4	2	2,55

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	TAHUN / REALISASI				TAHUN 2022	
			2018	2019	2020	2021	TARGET	REALISASI
47	Persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu - Campak - Difteri	-	100	100	100	75	13	75
48	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	60	100	100	100	100	80	100
49	Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
50	Prosentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)	98	MR : 98,6 DT : 98,7 Td : 98,9	MR : 98,9 DT : 99 Td : 99	MR : 95,6 DT : 95,5 Td : 95,9	MR : 71,4 DT : 63,6 Td : 60,6	98	MR : 97,07 DT : 96,36 Td : 97,05 HPV: 85,11
51	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji	70	100	100	100	Tidak ada pelaksanaan haji pada tahun 2021	90	100
52	Persentase desa / kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)	100	100	100	100	92,9	100	100
53	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92	99,4	97,2	95,7	72,3	94	98,6
54	Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Booster)	50	DPT/HB Hib :66,1% dan MR : 60,4%	DPT/HB Hib :71,7% dan MR : 65,6%	DPT/HB Hib :67,3% dan MR : 62%	DPT/HB Hib: 32,9% dan MR : 34,8%	75	DPT/HB Hib: 89,2% dan MR : 92%
55	Insiden Rate DBD*	59.81	1,84	27,28	15	0,006	55	0,02
56	Case Fatality Rate DBD*	0.65	2,86	0,02	0,02	0,05	0,56	2,02
57	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)	61.79	81,86	85	85,53	77,7	90	76,2
58	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)	60	72,2	48,83	35,2	56	85	50,87
59	Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate /CDR)	54	70,6	81	55,47	48,85	70	94,7
60	Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate / CNR) per 100.000 penduduk	63	151,1	168	120	127,2	90	206
61	Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	47.5	30,92	35	41,3	65	75	35,7
62	Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)	50	73	77	75	71	80	133
63	Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)	34	82,72	43	77	74, 35	85	77
64	Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV	53	62,36	82,07	68,9	74, 85	90	89,08
65	Angka Penemuan Kusta*	15.59	1,39	0,65	1,16	0,52	0,5	1,18
66	Persentase penemuan Pneumonia Balita	35.79	20,35	54,62	33,59	35,65	65	52,1

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	TAHUN / REALISASI				TAHUN 2022	
			2018	2019	2020	2021	TARGET	REALISASI
67	Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0	21	0,28	0,24	0,029	100	0,36
68	Jumlah penduduk usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0	5,9	13,7	19,83	33,95	100	51,46
69	Cakupan minum obat filariasis(POPM/ pemberian obat pencegahan masal)	87.2	97	97	97	97	-	-
70	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	0	NA	34,21	34,21	34,21	25	100
71	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	26	68,35	82,49	83,84	83,84	100	94,28
72	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	56,78	46,43	52,85	100	64,65
73	Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	-	12,3	90	72,64	70,39	100	84,98
74	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	-	19,86	18,39	25,63	38,6	100	40,35
75	Cakupan pelayanan gigi bumil	79	100	83,5	85,99	95,03	100	98,06
76	Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah	52	91,08	53,1	51,65	63,23	50	53,06
77	Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah)	89	75,52 \	90	78,73	88,81	90	93,88
78	Persentase desa total coverage PIS PK	16	67	94,28	98,32	100	100	100
79	Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	-	97,37	100	100	100	100	100
80	Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan	-	99,13	98,76	100	100	100	100
81	Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat	-	93,9	64,89	70	71,33	100	87,56
82	Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	-	90,85	100	100	97,9	100	100
83	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbelkes di Puskesmas yang tersedia	-	-	90	90	100	100	100
84	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
85	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	90	100	100	100	100	100	93

Keterangan :
 * = indikator negatif

Keterangan/Pembahasan tabel meliputi :

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dari 85 indikator kinerja program Dinas Kesehatan, pada tahun 2022 terdapat 60 indikator (71%) telah mencapai target dan ada 25 indikator (29%) belum mencapai target. Pencapaian indikator tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1.
Pencapaian Indikator Kinerja Program
Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes TA. 2022



b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan atau Permasalahan dan Solusi

- 1) Cakupan pelayanan balita (D/S) target 90% tercapai 76,51%.
Cakupan pelayanan balita belum memenuhi target karena partisipasi masyarakat untuk hadir di posyandu masih kurang karena masih ada balita yang belum hadir di posyandu dikarenakan masih takut adanya covid-19. Kegiatan yang akan dilakukan untuk menanggulangnya dengan promosi pentingnya deteksi tumbuh kembang anak dan peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam penilaian antropometri.
- 2) Cakupan Keluarga sadar gizi realisasi 60,07% dari target 80%.
- 3) Cakupan desa baik garam realisasi 65,3% dari target 100%.
- 4) Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium realisasi 94,7% dari target 100%.
Cakupan kadarzi, desa baik garam, dan konsumsi garam yodium belum mencapai target karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan garam beryodium, masih terdapat garam di pasar / toko yang menjual garam dengan kandungan yodiumnya rendah, dan ada beberapa puskesmas yang belum melaksanakan pemantauan garam beryodium karena belum memiliki alat untuk tes yaitu iodine test. Solusinya berupa penertiban penjual; berfungsinya perda garam; peningkatan sosialisasi.
- 5) Kunjungan K4 target 90% tercapai 88,65%. Cakupan K4 belum memenuhi target karena masih adanya ibu hamil yang belum mau pemeriksaan kehamilannya pada kunjungan ke-

4 dan adanya ibu hamil yang kunjungan kehamilannya ke-1 masuk dalam trimester 2 (dua). Upaya yang dilakukan untuk menanganinya adalah dengan edukasi ke masyarakat dan ibu melalui KIBBL (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir) dan Program Gerakan Brebes Kawal Wong Meteng (Grebek Wong Meteng).

- 6) Deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat target 50% tercapai 48,9%.
Belum mencapai target karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendeteksi secara dini resiko dan komplikasi ibu hamil oleh masyarakat sehingga untuk menanggulangnya dilakukan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan KIBBL
- 7) Pelayanan kesehatan balita sesuai standar target 90% tercapai 84,32%.
Sesuai dengan hasil cakupan pelayanan balita belum memenuhi target demikian juga pelayanan balita sesuai standar juga belum bisa memenuhi target karena partisipasi masyarakat untuk hadir di posyandu masih kurang karena masih ada balita yang belum hadir di posyandu dikarenakan masih takut adanya covid-19. Kegiatan yang akan dilakukan untuk menanggulangnya dengan promosi pentingnya deteksi tumbuh kembang anak dan peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam penilaian antropometri dan pemenuhan alat antropometri.
- 8) Prosentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS) belum mencapai target 98% karena adanya penolakan di tiga wilayah yaitu Salem, Bumiayu, dan Ketanggungan yang rata-rata merupakan sekolah swasta. Solusi dengan cara puskesmas telah melakukan koordinasi dengan sekolah serta sweeping, namun tetap sasaran tidak mau hadir.
- 9) Case Fatality Rate (CFR) DBD realisasi 2,02 dari target 0,56, belum mencapai target karena tingginya angka kematian demam berdarah pada tahun 2022 yang disebabkan terlambatnya penanganan kejadian demam berdarah. Solusi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan upaya kesehatan berupa perubahan perilaku (promotif) dan pencegahan (preventif).
- 10) Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate) realisasi 76,2% dari target 90%, belum mencapai target karena masih ada fasilitas kesehatan yang belum diisi hasil evaluasi pengobatannya. Solusi : monitoring ke pengelola program TB di faskes untuk segera mengisi hasil akhir pengobatan tersebut.
- 11) Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat realisasi 50,87% dari target 85%, belum mencapai target karena pasien TB RO ada yang meninggal sebelum pengobatan, ada yang belum mau memulai pengobatan, dan ada juga yang putus berobat dikarenakan efek samping obat. Solusinya dengan edukasi dan motivasi kepada pasien dan juga keluarga pasien untuk bisa memulai pengobatan.
- 12) Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV realisasi 35,7% dari target 75%, belum mencapai target karena pasien TB yang ditemukan dan diobati masih banyak yang tidak dilakukan screening HIV dan ada yang sudah di screening HIV namun hasilnya belum diinput di SITB (Sistem Informasi Tuberculosis). Solusinya dengan menyampaikan dan memonitoring kepada pengelola program TB faskes untuk melakukan screening HIV kepada semua pasien TB dan jika sudah discreening HIV untuk diinput di SITB.

- 13) Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART) realisasi 77% dari target 85%, belum mencapai target karena :
- Belum semua puskesmas melaksanakan ANC (*Antenatal Care*) setiap hari, sehingga mengurangi kunjungan cakupan beresiko ibu hamil di puskesmas. Solusi: bintek dan monev program HIV;
 - Beban kerja SDM di layanan kesehatan/puskesmas yang banyak dan sarana yang belum memadai dalam mendukung pelaporan. Solusi : *on the job training* pencatatan dan pelaporan HIV.
- 14) Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV realisasi 89,08% dari target 90%, belum mencapai target karena kurangnya kesadaran pasien tentang pentingnya pengobatan ARV (*Antiretroviral*). Solusi : berkoordinasi dengan LSM pendamping untuk meningkatkan capaian kasus HIV yang di obati.
- 15) Angka Penemuan Kusta realisasi 1,18 dari target 0,5 belum mencapai target karena masih tingginya kasus *drop out* pada pasien kusta yg sedang diobati di Kabupaten Brebes, sehingga tingkat penularan juga meningkat. Solusi dengan meningkatkan monitoring dan pengawasan pengobatan, pasien yg sudah ditemukan agar diobati sampai selesai (*RFT/Release From Treatment*) sehingga risiko untuk menularkan lebih kecil.
- 16) Persentase penemuan Pneumonia Balita realisasi 52,05% dari target 65%, belum mencapai target karena :
- Pelaksanaan MTBS utk kunjungan balita batuk atau sesak napas, belum dilaksanakan dengan optimal,
 - Belum semua kunjungan balita batuk atau sesak napas, dilaksanakan hitung nafas;
 - Belum semua puskesmas mempunyai jejaring dengan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya sehingga kasus tidak dilaporkan.
- Solusinya berupa :
- OJT (On The Job Training) bidan di poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit);
 - BIMTEK pencatatan dan pelaporan kasus;
 - Diharapkan semua puskesmas membuat jejaring dengan faskes di wilayah kerjanya.
- 17) Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara realisasi 0,36% dari target 100%, belum mencapai target dikarenakan :
- Kesadaran masyarakat terutama kelompok sasaran perempuan usia 30-50 tahun masih sangat rendah;
 - Rasa malu dan takut untuk melakukan pemeriksaan vagina;
 - Rasa takut bila diketahui penyakitnya dan harus melakukan pengobatan yang menyita waktu, tenaga, dan biaya yang banyak;
 - Saat ini biaya pemeriksaan sudah tidak ditanggung lagi oleh BPJS di puskesmas.
- Solusi :
- KIE ke kelompok sasaran;
 - Advokasi ke stakeholder mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke desa;
 - Membuat surat edaran dari puskesmas ke desa agar kelompok sasaran melakukan pemeriksaan ke bidan praktek mandiri karena bisa di klaim di BPJS.

- 18) Jumlah penduduk usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar realisasi 51,46% dari target 100%, belum mencapai target dikarenakan :
- Setengah tahun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga kegiatan di masyarakat masih dibatasi. Solusi yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Posbindu Mobil, petugas yang mendatangi sasaran;
 - Jumlah sasaran yang besar, sehingga SDM dan logistik belum mencukupi untuk pelaksanaan DDFR PTM (Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular) sesuai standard. Solusi yang dilaksanakan adalah, melibatkan peran serta masyarakat dan desa untuk pemenuhan logistik dan transport kader;
 - Jumlah SDM Pengelola Program P2PTM (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular) di Dinas hanya 1 orang dengan 3 indikator SPM di bidang PTM, dan banyak indikator diluar SPM, serta Program PTM diluar indikator PTM, sehingga program PTM belum bisa berjalan optimal;
 - Jumlah SDM Pengelola Program P2PTM di Puskesmas juga terbatas dan harus merangkap memegang program lain yang mungkin dianggap lebih penting sehingga program P2PTM di Puskesmas juga belum terlaksana optimal;
 - Kesadaran Masyarakat untuk mengikuti deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular yang masih rendah karena merasa sehat. Solusi yang dilaksanakan adalah melakukan KIE kepada sasaran bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait.
- 19) Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM realisasi sebesar 94,28% dari target 100%, belum mencapai target dikarenakan :
- Pembentukan Posbindu PTM dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Solusi : penambahan pembentukan Posbindu PTM di tahun berikutnya;
 - Pelatihan kader posbindu setiap tahun juga dilakukan bertahap mengingat keterbatasan anggaran. Solusi : pihak desa dapat melaksanakan pelatihan kader posbindu dengan menggunakan ADD (Anggaran Dana Desa).
- 20) Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar realisasi sebesar 64,65% dari target 100%, belum mencapai target dikarenakan antara lain koordinasi lintas sektor terkait kurang maksimal dan masih adanya stigma dari masyarakat terhadap ODGJ membuat masyarakat enggan melaporkan ke faskes. Solusinya berupa KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dengan advokasi ke perangkat desa saat kunjungan ke keluarga ODGJ pasung, dan memaksimalkan TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) yang sudah terbentuk, sehingga wadah koordinasi penanganan ODGJ lebih meningkat.
- 21) Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar realisasi sebesar 84,98% dari target 100%, belum mencapai target dikarenakan antara lain :

- Setengah tahun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, penderita takut untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Solusi yang dilaksanakan adalah kunjungan rumah pada penderita diabetes melitus;
- SDM kesehatan terutama dokter dan perawat belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar. Solusi yang dilaksanakan adalah meminta tambahan tenaga medis dan paramedis;
- Kesadaran masyarakat terutama keluarga penderita yang masih rendah untuk mendukung penderita untuk mau melaksanakan kunjungan ke faskes. Solusi yang dilaksanakan adalah KIE kepada keluarga pasien saat melakukan kunjungan.

22) Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar realisasi sebesar 40,35% dari target 100%, belum mencapai target dikarenakan antara lain :

- Setengah tahun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, Penderita takut untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Solusi yang dilaksanakan adalah kunjungan rumah pada penderita hipertensi;
- Jumlah sasaran yang besar, sehingga SDM kesehatan terutama dokter dan perawat belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sesuai standard. Solusi yang dilaksanakan adalah meminta tambahan tenaga medis dan paramedis.
- Kesadaran masyarakat terutama keluarga penderita yang masih rendah untuk mendukung penderita untuk mau melaksanakan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Solusi yang dilaksanakan adalah KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada keluarga pasien saat melakukan kunjungan.

23) Cakupan Pelayanan Gigi Ibu Hamil realisasi sebesar 98,06% dari target 100%, belum mencapai target dikarenakan kurangnya koordinasi dan integrasi antar ruang pelayanan di puskesmas; Kurangnya sosialisasi kepada ibu hamil dan pendamping bumil; Saat kunjungan ibu hamil ke poli gigi tidak dapat bertemu petugas karena petugas hanya satu dan sedang tugas luar gedung atau berhalangan secara kedinasan; serta Ibu hamil langsung pulang, tidak memeriksakan giginya karena alasan tertentu. solusinya adalah melaksanakan pendampingan terhadap Puskesmas dalam rangka penyuluhan dan sosialisasi kepada ibu hamil dan pendamping bumil untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut yang baik. Meskipun demikian, terdapat peningkatan kinerja pelayanan gigi ibu hamil pada tahun 2022, tentunya karena koordinasi dan integrasi yang baik antar ruang pelayanan di puskesmas dan lintas program.

24) Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat realisasi sebesar 87,56% dari target 100%, belum mencapai target dikarenakan adanya perubahan sistem perizinan dari manual ke aplikasi yang mengakibatkan tidak semua pemohon memahami cara menggunakan aplikasi tersebut. Namun cakupan tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya sistem OSS dan sistem SPP-IRT BPOM terintegrasi OSS sehingga memudahkan pemohon dalam mengajukan permohonan izin serta memudahkan Dinas Kesehatan dalam memproses perizinannya. Solusi dari permasalahan tersebut berupa diadakannya sosialisasi regulasi perijinan.

25) Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan realisasi 93% dari target 100%, belum mencapai target disebabkan ujian kompetensi fungsional belum dapat dilaksanakan karena ada aturan baru harus menunggu penilaian akreditasi penyelenggaran ukom. Sehingga saat ini masih menunggu hasil penilaian akreditasi penyelenggara ukom untuk dapat melaksanakan ujian kompetensi bagi tenaga fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Solusi : pelaksanaan ukom akan dilaksanakan tahun 2023 setelah adanya hasil penilaian akreditasi.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja program yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes memiliki 2 (dua) sasaran kinerja yaitu :

- 1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

Guna mencapai kedua sasaran tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan beberapa program yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dari kelima program yang dilaksanakan pada tahun 2022, seluruhnya sudah sesuai dan mendukung secara langsung pencapaian target indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

2. Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes TA. 2022

NO	URUSAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	DINAS KESEHATAN				
	Belanja Operasi	178.205.473.025	163.781.291.685		91,91
	Belanja Modal	13.465.946.343	12.046.894.688		89,46
2	UPTD KP2K				
	Belanja Operasi	436.378.000	433.670.976		99,38
	Belanja Modal	14.347.000	14.340.930		99,96
3	UPTD Labkesda				
	Belanja Operasi	666.160.500	641.662.873		96,32
	Belanja Modal	16.664.500	15.630.000		93,79
4	BLUD UPTD Puskesmas Tanjung				
	Belanja Operasi	33.042.287.544	29.157.800.484		88,24
	Belanja Modal	2.148.560.000	1.561.757.797		72,69
5	BLUD UPTD Puskesmas Brebes				
	Belanja Operasi	25.436.448.862	24.152.559.680		94,95
	Belanja Modal	350.000.000	294.659.427		84,19
6	BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo				
	Belanja Operasi	29.374.386.401	29.527.153.642		100,52
	Belanja Modal	1.970.000.000	1.643.997.699		83,45
7	BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan				
	Belanja Operasi	15.939.766.127	15.232.528.658		95,6
	Belanja Modal	600.000.000	161.500.000		26,9
8	BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu				
	Belanja Operasi	20.261.000.000	14.755.405.905		72,83
	Belanja Modal	590.901.733	441.962.560		74,79
	JUMLAH	322.518.320.035	293.862.817.004		91,11

A. DINAS KESEHATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.400.368.860	1.352.519.400	96,58
1.	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.034.914.740	997.599.950	96,39
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.034.914.740	997.599.950	96,39
2.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	365.454.120	354.919.450	97,12
2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	365.454.120	354.919.450	97,12
B.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.223.294.882	62.232.905.352	87,38
1.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.899.752.030	2.565.610.600	88,48
1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	972.767.030	882.647.600	90,74
1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	302.445.000	245.340.000	81,12
1.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	424.540.000	408.623.000	96,25
1.4	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.200.000.000	1.029.000.000	85,75
2.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.820.591.737	59.191.047.852	87,28
2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.231.449.360	4.010.106.000	94,77
2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.181.713.000	987.855.000	83,60
2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	170.346.800	154.740.800	90,84
2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.608.504.340	4.188.243.056	90,88
2.5	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.853.200	36.226.600	88,68
2.6	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.047.150.000	4.861.150.520	44,00
2.7	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	345.667.500	331.624.200	95,94
2.8	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	151.926.500	76.742.000	50,51
2.9	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.686.106.180	3.537.770.780	95,98
2.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.057.319.200	928.124.528	87,78
2.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	609.411.035	551.687.078	90,53

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	18.390.000	17.880.000	97,23
2.13	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	42.867.000	42.420.000	98,96
2.14	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	300.943.300	297.924.180	99,00
2.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	114.004.900	112.478.900	98,66
2.16	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	649.377.840	578.671.416	89,11
2.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	86.842.800	54.587.800	62,86
2.18	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	248.824.283	71.740.800	28,83
2.19	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	39.092.513.499	38.222.973.394	97,78
2.20	Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	12.054.000	8.574.000	71,13
2.21	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	114.605.000	110.005.000	95,99
2.22	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9.722.000	9.521.800	97,94
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	385.369.355	376.389.400	97,67
3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	385.369.355	376.389.400	97,67
4.	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.581.760	99.857.500	84,93
4.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	117.581.760	99.857.500	84,93
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	431.693.843	383.693.620	88,88
1.	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	431.693.843	383.693.620	88,88
1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	431.693.843	383.693.620	88,88
D.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.211.102.681	97.471.654.920	95,36
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.925.400	152.139.600	58,76
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.358.600	62.627.600	43,08
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.714.500	6.104.000	90,91

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.002.500	6.365.000	90,90
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.624.300	2.160.500	82,33
1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.767.500	2.767.500	100,00
1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.458.000	72.115.000	76,35
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.297.784.381	90.106.803.882	97,63
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	138.876.740	98.057.550	70,61
2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.158.907.641	90.008.746.332	97,67
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	521.142.000	427.378.900	82,01
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	140.405.000	139.730.000	99,52
3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	380.737.000	287.648.900	75,55
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.228.132.400	1.145.380.943	93,26
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.220.000	77.645.684	85,12
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.185.500	103.055.800	95,26
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.209.500	27.175.000	99,87
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.820.000	135.677.500	93,04
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.742.400	48.323.550	99,14
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.682.000	97,88
4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	791.955.000	738.821.409	93,29
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	646.870.520	631.368.946	97,60
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0	0	0,00
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	646.870.520	631.368.946	97,60
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.904.179.280	3.703.135.452	62,72
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.110.429.400	727.352.467	65,50
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.793.249.880	2.975.608.585	62,08
6.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	174.400	34,88

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.354.068.700	1.305.447.197	96,41
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.661.700	270.829.697	90,08
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5.372.000	4.939.000	91,94
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.358.000	104.390.500	92,09
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	934.677.000	925.288.000	99,00
E.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	16.404.959.102	14.357.580.581	87,52
1.	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	472.842.000	426.965.888	90,30
1.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	472.842.000	426.965.888	90,30
2.	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.857.631.142	13.867.158.093	87,45
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.857.631.142	13.867.158.093	87,45
3.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	74.485.960	63.456.600	85,19
3.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	74.485.960	63.456.600	85,19
TOTAL		191.671.419.368	175.798.353.873	91,72

B. UPTD KP2K

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
I	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	389.044.800	386.334.276	99,30
1	Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	56.854.400	56.836.640	99,97
1.1	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.273.900	20.267.940	99,97
1.2	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor	31.707.000	31.697.800	99,97
1.3	Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.873.500	4.870.900	99,95
2	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	287.004.000	284.381.600	99,09
2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.976.000	50.102.100	98,29
2.2	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	236.028.000	234.279.500	99,26
3	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	45.186.400	45.116.036	99,84
3.1	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4.698.000	4.697.636	99,99
3.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.152.000	20.082.000	99,65
3.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	20.336.400	20.336.400	100
II	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	46.980.200	46.977.600	100
1	Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	46.980.200	46.977.600	100
1.1	Sub Kegiatan : Pengadaan bahan habis pakai	46.980.200	46.977.600	100
III	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	14.700.000	14.700.000	100
1	Kegiatan : Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif/preventif tingkat daerah kabupaten/kota	14.700.000	14.700.000	100
1.1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat	14.700.000	14.700.000	100

C. UPTD LABKESDA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	365.838.000	342.095.293	93,51
A	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.500.000	12.500.000	100,00
1	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.500.000	12.500.000	100,00
B	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.528.000	53.171.284	90,85
2	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.385.900	14.096.505	91,62
3	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.509.200	2.246.934	89,55
4	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.187.000	12.996.863	98,56
5	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.460.900	8.388.160	88,66
6	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.985.000	15.442.822	85,87
C	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.430.000	263.484.259	94,63
7	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	62.430.000	54.174.259	86,78
8	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.000.000	209.310.000	96,90
D	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.380.000	12.939.750	79,00
9	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.160.000	1.427.000	66,06
10	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	4.504.750	64,35
11	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.220.000	7.008.000	97,06
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	251.808.000	249.032.070	98,90
E	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	194.250.000	191.679.170	98,68
12	Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Vaksin	173.000.000	171.736.750	99,27
13	Sub Kegiatan: Pengadaan Bahan Habis Pakai	21.250.000	19.942.420	93,85
F	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.420.000	45.222.900	99,57
14	Sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	37.920.000	37.920.000	100,00
15	Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.500.000	7.302.900	97,37

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
G	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	12.138.000	12.130.000	99,93
16	Sub Kegiatan: Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	12.138.000	12.130.000	99,93
III	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	45.713.000	45.603.460	99,76
H	Kegiatan: Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	45.713.000	45.603.460	99,76
17	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	45.713.000	45.603.460	99,76
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	22.466.000	20.566.900	91,55
I	Kegiatan: Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.466.000	20.566.900	91,55
18	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	22.466.000	20.566.900	91,55

D. BLUD UPTD PUSKESMAS TANJUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.201.447.544	24.441.799.850	86,66
A	Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	28.201.447.544	24.441.799.850	86,66
1.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	28.201.447.544	24.441.799.850	86,66
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.410.037.852	2.145.608.702	89,02
B	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.410.037.852	2.145.608.702	89,02
2.	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	2.410.037.852	2.145.608.702	89,02
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.579.362.148	4.132.149.730	90,23
C	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.266.511.576	2.065.219.528	91,12
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.266.511.576	2.065.219.528	91,12
D	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.312.850.572	2.066.930.202	89,37
4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2.312.850.572	2.066.930.202	89,37
TOTAL		35.190.847.544	30.719.558.281	87,29

E. BLUD UPTD PUSKESMAS BREBES

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.696.948.862	18.217.921.104	97,44
A	Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.696.948.862	18.217.921.104	97,44
1.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.696.948.862	18.217.921.104	97,44
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.602.494.000	1.483.878.399	92,59
B	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.602.494.000	1.483.878.399	92,59
2.	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	1.602.494.000	1.483.878.399	92,59
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.487.006.000	4.745.419.604	86,48
C	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.080.476.000	2.766.308.567	89,80
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.080.476.000	2.766.308.567	89,80
D	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.406.530.000	1.979.111.037	82,23
4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2.406.530.000	1.979.111.037	82,23
TOTAL		25.786.448.862	24.447.219.107	94,81

F. BLUD UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.344.386.401	31.585.220.470	100,77
A	Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	31.344.386.401	31.585.220.470	100,77
1.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	31.344.386.401	31.585.220.470	100,77
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.437.739.680	2.286.049.890	93,7
B	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.437.739.680	2.286.049.890	93,7
2.	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	2.437.739.680	2.286.049.890	93,7
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.018.779.320	4.706.104.900	93,77
C	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.509.686.120	2.361.023.596	94,07
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.509.686.120	2.361.023.596	94,07
D	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.509.093.200	2.345.081.304	93,4
4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2.509.093.200	2.345.081.304	93,4
TOTAL		38.800.905.401	38.577.375.260	99,42

G. BLUD UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.574.066.127	11.796.566.811	93,8
A	Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12.574.066.127	11.796.566.811	93,8
1.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12.574.066.127	11.796.566.811	93,8
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	802.640.000	741.285.756	92,4
B	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	802.640.000	741.285.756	92,4
2.	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	802.640.000	741.285.756	92,4
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.163.060.000	2.856.176.091	90,29
C	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.495.891.000	1.367.862.489	91,4
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.495.891.000	1.367.862.489	91,4
D	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.667.169.000	1.488.313.602	89,3
4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.667.169.000	1.488.313.602	89,3
TOTAL		16.539.766.127	15.394.028.658	93,07

H. BLUD UPTD PUSKESMAS BUMIAYU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.560.000.000	12.578.688.611	80,84
A	Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15.560.000.000	12.578.688.611	80,84
1.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15.560.000.000	12.578.688.611	80,84
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.556.300.000	1.457.709.542	93,67
B	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.556.300.000	1.457.709.542	93,67
2.	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	1.556.300.000	1.457.709.542	93,67
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.144.700.000	2.824.521.752	89,82
C	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.615.800.000	1.514.532.338	93,73
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.615.800.000	1.514.532.338	93,73
D	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.528.900.000	1.309.989.414	85,68
4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.528.900.000	1.309.989.414	85,68
TOTAL		20.261.000.000	16.860.919.905	83,22

Program mencakup tujuan, manfaat dan dampak dan Kegiatan dan sub kegiatan meliputi keluaran/hasil dari pelaksanaan kegiatan

A. DINAS KESEHATAN

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Tujuan Program	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah, memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan kinerja, meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual 2. Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Menyeimbangkan jumlah pegawai dengan kebutuhan dan untuk menyesuaikan beban kerja yang ada dengan jumlah pegawai yang tersedia 4. Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah 6. Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah 7. Mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Dampak Program	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun) 2. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran dan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di bidang administrasi keuangan, Terwujudnya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang berdampak pada pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kab. Brebes lainnya. 3. Meningkatnya mutu Pelayanan kesehatan kepada masyarakat 4. Terwujudnya pelayanan fasilitasi kunjungan tamu yang berdampak pada pelayanan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kab. Brebes lainnya. 5. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas 6. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7. Terwujudnya pembiayaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
	Manfaat Program	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan dan evaluasi dapat terarah dan terukur sesuai dengan Urusan Bidang, dan terjaminnya kelancaran serta tersedianya dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. 2. Terciptanya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel, tersedianya pembiayaan administrasi keuangan perangkat daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun)

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Agar tata kelola administrasi PNS dan Non PNS berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Tersedianya pembiayaan administrasi Umum perangkat daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun) 5. Tersedianya pembiayaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penyusunan Renja Dinkes Brebes, Penyusunan Renstra Dinkes 2023-2026, Rapat Koordinasi RPK BLUD, Sosialisasi renstra b. Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Penyusunan RKA Dinkes Brebes c. Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Penyusunan RKA Perubahan d. Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Penyusunan DPA e. Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, Penyusunan DPA Perubahan f. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Perencanaan, Renja Dinkes Brebes, Renstra Dinkes 2023-2026, RPK BLUD) b. Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD e. Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD f. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Buku Profil Kesehatan 'Buku Saku', Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 'LAKIP' dan LPJ, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Keluaran Kegiatan	:	a. Dokumen Gaji b. Dokumen Laporan Akhir Tahun
	Hasil Kegiatan	:	a. Tersusunnya Dokumen Gaji b. Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan	:	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Keluaran Kegiatan	:	a. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu : – Pengadaan Pakaian PSH (hitam putih) 127 stel – Pengadaan Pakaian Olah raga 130 stel – Pengadaan bahan batik salem 135 stel – Pengadaan bahan batik salem RSUD Ir. Soekarno 55 stel b. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 c. Terlaksananya Sosialisasi SIAP (Sistem Inventarisasi Aset Pemerintah) d. Terlaksananya Sosialisasi SKP berbasis hasil 2021 e. Terlaksananya Evaluasi Inventarisasi BMD f. Terlaksananya PAK jabatan fungsional sebanyak 2 kali g. Terlaksananya klarifikasi kedisiplinan sebanyak 3 kasus h. Terlaksananya klarifikasi ijin perceraian sebanyak 5 kasus i. Monitoring dan evaluasi kepegawaian dan asset sebanyak 38 puskesmas
	Hasil Kegiatan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Keluaran Kegiatan	:	a. Jenis Komponen listrik/penerangan (7 Jenis komponen listrik dan 3 jenis pemeliharaan : Genset, jaringan telepon dan jaringan listrik) b. Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (59 Jenis ATK dan materai) c. Jenis Peralatan rumah tangga (11 jenis alat kebersihan kantor dan 7 jenis bahan kebersihan kantor) d. Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (3 Jenis : makanan minuman pegawai, makanan minuman penjaga keamanan dan makanan minuman kegiatan rapat) e. Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (13 Jenis barang cetak dan tersedianya penggandaan) f. Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan Tersedia (2 Jenis koran selama 1 tahun) g. Laporan Perjalanan Luar Daerah

	Hasil Kegiatan	:	a. Tersusunnya Laporan Perjalanan Luar Daerah b. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan	:	a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Keluaran Kegiatan	:	a. 25 Jenis alat tulis kantor RSUD Ketanggungan b. 21 Jenis alat Dapur RSUD Ketanggungan c. 10 jenis perlengkapan RSUD Ketanggungan d. 3 Jenis alat rumah tangga RSUD Ketanggungan e. 7 jenis alat telemedicine f. 42 jenis alat lainnya dan spanduk
	Hasil Kegiatan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Keluaran Kegiatan	:	a. Ketersediaan Honorarium Penanggungjawab Keuangan, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Jasa Kebersihan Kantor b. Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis tagihan air, listrik, telepon dan internet) untuk DKK Brebes dan RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan c. Jumlah Surat Keluar yang didistribusikan (10 Buah) d. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (6 Orang Cleaning service di Dinas Kesehatan, 7 orang cleaning service di RSUD Ir. Soekarano dan orang 7 petugas keamanan di RSUD Ir. Soekarano)
	Hasil Kegiatan	:	a. Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor b. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Mebel c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Keluaran Kegiatan	:	g. Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (11 Unit) h. Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (13 Unit) i. Jumlah Motor diproses surat perijinannya (30 unit) j. Kegiatan balik nama kendaraan SPGDT (1 unit mobil dan 6 unit motor) k. Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik (8 Unit meja dan 1 set sofa) l. Jumlah Peralatan kerja diperbaiki/ dipelihara (25 Unit AC, 25 unit printer, 23 unit computer, jaringan internet dan 4 paket CCTV) m. Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (7 Unit) : n. Ruang kerja seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit o. Ruang kerja seksi Surveilans dan Imunisasi p. Ruang kerja seksi Promosi kesehatan lingkungan q. Ruang studio music dan ruang rapat kepala dinas

			<ul style="list-style-type: none"> r. Halaman dan pagar Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes s. Gedung instalasi farmasi t. Ruang sarana Prasarana RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan
	Hasil Kegiatan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	Tujuan Program	:	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dampak Program	:	Terpenuhinya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Manfaat Program	:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
	a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan b. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan c. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan d. Pengadaan Bahan Habis Pakai
	Keluaran Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Puskesmas Siwuluh b. Renovasi Ruang Kerja Puskesmas Kluwut c. Tersedianya Mobil Ambulance d. Tersedianya Antropometri kit e. Tersedianya USG 2D f. Tersedianya Hepafilter g. Tersedianya Mesin spray desinfectan dan starter kit h. Tersedianya Masker disposable
	Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) unit Puskesmas Siwuluh b. 1 (satu) unit Puskesmas Kluwut c. 3 (tiga) unit Mobil Ambulance (Puskesmas Kluwut, Puskesmas Wanasari dan Puskesmas Kersana) d. 42 unit antropometri kit guna memantau pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya balita e. 2 (dua) unit USG 2D guna memantau pertumbuhan dan kesehatan ibu hamil f. 2 (dua) unit hepafilter g. 4 (empat) unit mesin spray desinfectan dan starter kit h. 4.230 box masker disposable
	b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Produktif g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

		<ul style="list-style-type: none"> i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya p. Pengelolaan Surveilans Kesehatan q. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus r. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular s. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat t. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah u. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota v. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
	Keluaran Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlayannya ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, dan lansia b. Tersedianya Data Capaian SPM Bidang Kesehatan c. Tersedianya Data-data Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular d. Tersedianya Data Skrining Penyalahgunaan NAPZA dengan Metode ASSIST (Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test) e. Jumlah RS yang telah bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) dan puskesmas melalui Dinkes (rumah sakit) f. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional (puskesmas) g. Jumlah desa total coverage PIS-PK h. Jumlah pos kesehatan untuk Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan (poskes) i. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) j. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi k. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan PIS-PK l. Jumlah FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) non puskesmas yang mendapat sosialisasi akreditasi FKTP (FKTP) m. Jumlah puskesmas terakreditasi
	Hasil Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL b. Menurunnya angka kesakitan pada anak dan lansia (lanjut usia) c. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak-anak, remaja, dan lansia d. Penduduk Usia Produktif (15 – 59 tahun) yang dideteksi dini faktor resiko penyakit menular sesuai standard. e. Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standard oleh tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya)

		<ul style="list-style-type: none"> f. Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standard di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya) g. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standard di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya) h. Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan penyakit menular dan ntidak menular di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) i. Siswa/siswa Sekolah Menengah Atas/SMA sederajat yang mendapatkan skrining Penyalahgunaan NAPZA dengan Metode ASSIST j. Rumah Sakit telah bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) dan puskesmas melalui Dinkes k. Seluruh puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional l. Seluruh desa telah total coverage dilakukan kunjungan rumah dalam rangka Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) m. Terdapat Pos Kesehatan untuk Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan n. Seluruh puskesmas menyelenggarakan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) o. Seluruh Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan gigi p. Tim Bina Wilayah tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan PIS-PK di Puskesmas q. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) Klinik yang bekerjasama dengan BPJS mendapat sosialisasi akreditasi FKTP sesuai standar r. Seluruh puskesmas telah terakreditasi
	c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
	Sub Kegiatan	: Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Keluaran Kegiatan	: 7 buah dokumen Sistem Informasi Kesehatan
	Hasil Kegiatan	: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
	d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
	Keluaran Kegiatan	: Jenis perizinan (SIP/Surat Ijin Praktik, SIK/Surat Ijin Kerja, dokter dan nakes lain, RS, Klinik, Apotek)
	Hasil Kegiatan	: Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	Tujuan Program	: Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan (Sumber Daya Manusia Kesehatan)
	Dampak Program	: Meningkatnya sumber daya kesehatan
	Manfaat Program	: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
	a. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Keluaran Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Validasi Data SDM Puskesmas b. Validasi Data SDM Klinik c. Validasi Data SDM Rumah Sakit d. Entri Data Perencanaan Kebutuhan SDM Puskesmas dan RS

		<ul style="list-style-type: none"> e. Monitoring Data SDMK Puskesmas f. Monitoring Data SDMK Klinik g. Monitoring Data SDMK Rumah Sakit h. Monitoring Data Sarana dan Prasarana Puskesmas i. Diklat dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa j. Pertemuan Persiapan Uji Kompetensi Jabfung Kes k. Pertemuan Sosialisasi Persiapan Uji Kompetensi l. Pertemuan Sosialisasi Uji Kompetensi Jabfung Perawat m. Pertemuan Sosialisasi Uji Kompetensi Jabfung Bidan n. Pertemuan Sosialisasi Uji Kompetensi Jabfung Perawat Gigi o. Pertemuan Sosialisasi Uji Kompetensi Jabfung Sanitarian
	Hasil Kegiatan	: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman		
	Tujuan Program	: Terlaksananya kegiatan penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku industri rumah tangga pangan, sosialisasi regulasi terbaru terkait pelayanan kefarmasian
	Dampak Program	: Terpenuhinya makanan dan minuman yang aman, sehat, bergizi, tersedianya obat yang aman, bermutu dan berkhasiat
	Manfaat Program	: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) b. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Keluaran Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya produk obat, obat tradisional, UMOT, alat kesehatan yang memenuhi standar kesehatan b. Tersedianya sarana distribusi obat, obat tradisional, UMOT, alat kesehatan yang sudah berizin
	Hasil Kegiatan	: Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan produk obat, obat tradisional, UMOT, alat kesehatan
b. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
	Sub Kegiatan	: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Keluaran Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya produk industri rumah tangga yang memenuhi standard aman, sehat dan bergizi b. Tersedianya sarana produk industri rumah tangga yang sudah berizin c. Dokumen rekomendasi izin edar makanan dan minuman
	Hasil Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan produk industri rumah tangga b. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
	Tujuan Program	: Meningkatkan Prosentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

	Dampak Program	:	Tercapainya Prosentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
	Manfaat Program	:	Terciptanya Desa Sanitasi Total Berbasis di Kabupaten Brebes
	a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan	:	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat
	Keluaran Kegiatan	:	a. Jumlah Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat b. Jumlah Desa Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan APBDes Kesehatan
	Hasil Kegiatan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
	b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Keluaran Kegiatan	:	Jenis Media Promosi Kesehatan
	Hasil Kegiatan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan

B. UPTD KP2K

1.	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Tujuan	: Menyediakan kebutuhan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Dampak	: Meningkatnya kepuasan pelayanan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Manfaat	: Terpenuhinya kebutuhan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	a. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	
	Sub Kegiatan	: a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Keluaran Kegiatan	: Jenis dokumen administrasi umum
	Hasil Kegiatan	: Meningkatnya kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat Daerah
	b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan	: a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Keluaran Kegiatan	: Jenis dokumen administrasi umum
	Hasil Kegiatan	: Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan	: a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan /dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya
	Keluaran Kegiatan	: Jenis Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Hasil Kegiatan	: Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Tujuan	: Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dampak	: Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan
	Manfaat	: Terpenuhinya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	: a. Pengadaan Bahan Habis Pakai
	Keluaran Kegiatan	: Pengadaan Reagen dan Bahan Habis Pakai

	Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
	Tujuan	:	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Melalui Kegiatan Promosi Kesehatan
	Dampak	:	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Promosi Kesehatan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Manfaat	:	Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Melalui Kegiatan Promosi Kesehatan
	a. Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup dan Sehat
	Keluaran Kegiatan	:	Jenis Dokumen Tersedianya Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Terlaksananya Kegiatan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat
	Hasil Kegiatan	:	Tersedianya Kegiatan Promosi Dan Preventif

C. UPTD Labkesda

1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
	Tujuan program	:	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran strategis, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	Dampak program	:	Unit kerja internal yang terlayani dengan baik
	Manfaat program	:	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan perkantoran laboratorium kesehatan
	a. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		
	Sub kegiatan	:	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Keluaran kegiatan	:	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (upah pungut)
	Hasil kegiatan	:	Terpenuhinya penyediaan insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan kesehatan
	b. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		
	Sub kegiatan	:	a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan peralatan rumah tangga c. Penyediaan bahan logistik kantor d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Keluaran kegiatan	:	a. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor b. Tersedianya peralatan rumah tangga c. Tersedianya bahan logistik kantor d. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan e. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (perjalanan dinas luar daerah)
	Hasil kegiatan	:	a. Terpenuhinya alat tulis kantor, meterai, jasa pengiriman, dan motorized pipette b. Terpenuhinya perabot kantor dan alat/bahan kebersihan c. Terpenuhinya pengisian tabung gas, makan minum kebutuhan harian dan ekstra fooding pegawai, serta makan minum rapat staf meeting d. Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan, serta pembuatan spanduk e. Terpenuhinya pembayaran iuran Ablabkesda dan terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
	c. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
	Sub kegiatan	:	a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Keluaran kegiatan	:	a. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik b. Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (dokter, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, tenaga kebersihan)
	Hasil kegiatan	:	a. Terpenuhinya pembayaran tagihan air, listrik, dan wifi kantor b. Terpenuhinya honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)
	d. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
	Sub kegiatan	:	a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	Keluaran kegiatan	:	a. Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan b. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (AC, laptop/komputer, printer) c. Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	Hasil kegiatan	:	a. Terlaksananya pemeliharaan dan service kendaraan dinas, serta pembayaran pajak kendaraan dinas

			b. Terlaksananya pemeliharaan AC, laptop/komputer, dan printer kantor c. Terpenuhi pengisian APAR dan jaringan listrik
2.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
	Tujuan program	:	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran strategis dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	Dampak program	:	Melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
	Manfaat program	:	Tersedianya fasilitas pelayanan laboratorium untuk UKM dan UKP kewenangan daerah di Kabupaten Brebes
	a. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota		
	Sub kegiatan	:	a. Pengadaan obat, vaksin b. Pengadaan bahan habis pakai
	Keluaran kegiatan	:	a. Tersedianya reagen b. Tersedianya Bahan Habis Pakai (BHP)
	Hasil kegiatan	:	a. Terpenuhi reagen laboratorium b. Terpenuhi Bahan Habis Pakai (BHP) laboratorium
	b. Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota		
	Sub kegiatan	:	a. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular b. Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
	Keluaran kegiatan	:	a. Tersedianya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular b. Terlaksananya kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal
	Hasil kegiatan	:	a. Terpenuhi honorarium petugas sampling dan jasa lembur pegawai b. Terlaksananya kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal laboratorium klinik dan kesmas
	c. Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi		
	Sub kegiatan	:	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet
	Keluaran kegiatan	:	Tersedianya alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet
	Hasil kegiatan	:	Terpenuhi laptop dan printer kantor
3.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		
	Tujuan program	:	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran strategis, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta meningkatnya cakupan pemeliharaan alat kesehatan laboratorium
	Dampak program	:	Melaksanakan pelayanan sesuai standar
	Manfaat program	:	Meningkatnya cakupan alat kesehatan yang diverifikasi dokumen perizinannya
	a. Kegiatan pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga		
	Sub kegiatan	:	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga
	Keluaran kegiatan	:	Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium
	Hasil kegiatan	:	Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan laboratorium klinik dan kesmas
4.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		

	Tujuan program	:	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran strategis dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat
	Dampak program	:	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat
	Manfaat program	:	Terlaksananya PHBS dalam rangka promotif preventif di UPTD Labkes Kab. Brebes
	a. Kegiatan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota		
	Sub kegiatan	:	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
	Keluaran kegiatan	:	Terselenggaranya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
	Hasil kegiatan	:	Terpenuhinya pembayaran jasa petugas kebersihan, jasa retribusi limbah medis, dan terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

D. BLUD UPTD Puskesmas Tanjung

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Tujuan program	:	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
	Dampak program	:	Kualitas Pelayanan Kesehatan terlayani kepada masyarakat
	Manfaat program	:	Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan yang optimal
	a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		
	Sub Kegiatan	:	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
	Keluaran Kegiatan	:	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
	Hasil Kegiatan	:	Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan yang optimal
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	Tujuan program	:	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Dampak program	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
	Manfaat program	:	Tercapainya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan	:	Operasional Pelayanan Puskesmas
	Keluaran Kegiatan	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
	Hasil Kegiatan	:	Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
	Tujuan program	:	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Dampak program	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
	Manfaat program	:	Tercapainya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan	:	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Keluaran Kegiatan	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
	Hasil Kegiatan	:	Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan	:	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Keluaran Kegiatan	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
	Hasil Kegiatan	:	Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

E. BLUD UPTD Puskesmas Brebes

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Tujuan program	: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
	Dampak program	: Kualitas Pelayanan Kesehatan terlayani kepada masyarakat
	Manfaat program	: Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan yang optimal
	b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Sub Kegiatan	: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
	Keluaran Kegiatan	: Terlaksananya operasional Puskesmas dengan menerapkan PPK BLUD
	Hasil Kegiatan	: Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan yang optimal
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Tujuan program	: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Dampak program	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
	Manfaat program	: Tercapainya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	: Operasional Pelayanan Puskesmas
	Keluaran Kegiatan	: Terlaksananya kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP) di puskesmas Jagelempeni dan Puskesmas Brebes (BOK)
	Hasil Kegiatan	: Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	Tujuan program	: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Dampak program	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
	Manfaat program	: Tercapainya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	: Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Keluaran Kegiatan	: Terlaksananya kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP) di puskesmas Kalimati, Pemaron, Jatibarang dan Sidamulya (BOK)
	Hasil Kegiatan	: Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
	b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Keluaran Kegiatan	: Terlaksananya kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP) di puskesmas Kaligangsa, Klikiran, Wanasari
	Hasil Kegiatan	: Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

F. BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Tujuan program	:	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
Dampak program	:	Kualitas Pelayanan Kesehatan terlayani kepada masyarakat
Manfaat program	:	Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan yang optimal
a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	:	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Keluaran Kegiatan	:	Terlaksananya operasional Puskesmas dengan menerapkan PPK BLUD
Hasil Kegiatan	:	Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan yang optimal
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
Tujuan program	:	Meningkatkan mutu layanan kesehatan di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo.
Dampak program	:	Meningkatnya mutu layanan kesehatan di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo.
Manfaat program	:	Masyarakat dapat menikmati peningkatan mutu layanan kesehatan di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo.
a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	:	Operasional Pelayanan Puskesmas
Keluaran Kegiatan	:	Terlaksananya operasional pelayanan puskesmas di 9 puskesmas, sehingga Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota terpenuhi.
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya mutu layanan kesehatan di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
Tujuan program	:	a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo. b. Meningkatkan perubahan perilaku akibat kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo
Dampak program	:	a. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo. b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo
Manfaat program	:	a. Guna lebih meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan terjalinya kerjasama lintas sektor di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo yang lebih baik. b. Derajat kesehatan masyarakat di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo semakin meningkat
a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Keluaran Kegiatan	:	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo.
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo.

	b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Keluaran Kegiatan	: Terlaksananya kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di 9 Puskesmas kerja wilayah UPTD Puskesmas Banjarharjo.
	Hasil Kegiatan	: Tersampainya dengan baik pesan-pesan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di 9 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo

G. BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Tujuan program	:	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
Dampak program	:	Meningkatnya pelayanan puskesmas
Manfaat program	:	Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan yang optimal
b.Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	:	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Keluaran Kegiatan	:	Terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
Tujuan program	:	a. Meningkatkan indeks pelayanan Kesehatan Puskesmas b. Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat
Dampak program	:	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
Manfaat program	:	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	:	Operasional Pelayanan Puskesmas
Keluaran Kegiatan	:	Terlaksananya kegiatan pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
Tujuan program	:	c. Meningkatkan indeks pelayanan Kesehatan Puskesmas d. Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat
Dampak program	:	a. Meningkatkan kegiatan promosi Kesehatan b. Meningkatkan kegiatitan dalam rangka Gerakan hidup bersih dan sehat
Manfaat program	:	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Keluaran Kegiatan	:	Jumlah kader dan lintas sektor yang ikut berperan serta dalam upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Keluaran Kegiatan	:	Jumlah kegiatan dalam rangka upaya promosi Kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

H. BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Tujuan program	:	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
Dampak program	:	Kualitas Pelayanan Kesehatan terlayani kepada masyarakat
Manfaat program	:	Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan yang optimal
a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	:	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Keluaran Kegiatan	:	Terlaksananya penyelenggaraan perawatan kesehatan masyarakat di puskesmas
Hasil Kegiatan	:	Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan yang optimal
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
Tujuan program	:	Meningkatkan mutu layanan kesehatan di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu.
Dampak program	:	Meningkatnya mutu layanan kesehatan di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu.
Manfaat program	:	Masyarakat dapat menikmati peningkatan mutu layanan kesehatan di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu.
a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	:	Operasional Pelayanan Puskesmas
Keluaran Kegiatan	:	Terlaksananya penyelenggaraan BOK Puskesmas.
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya mutu layanan kesehatan di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
Tujuan program	:	c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu. d. Meningkatkan perubahan perilaku akibat kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu
Dampak program	:	c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu. d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu
Manfaat program	:	c. Guna lebih meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan terjalinya kerjasama lintas sektor di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu yang lebih baik. d. Derajat kesehatan masyarakat di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu semakin meningkat
a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Keluaran Kegiatan	:	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu.
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu.
b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

	Keluaran Kegiatan	:	Terlaksananya kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di 6 Puskesmas kerja wilayah UPTD Puskesmas Bumiayu.
	Hasil Kegiatan	:	Tersampainya dengan baik pesan-pesan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di 6 Puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu

3. Penghargaan yang didapat di tahun 2022 (tingkat provinsi dan atau tingkat nasional)

- 1. Prestasi Kabupaten Brebes dalam mencapai *Universal Health Coverage (UHC)* Tahun 2022 yang diberikan oleh BPJS Kesehatan



PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor 2.Presentase Dokumen Keuangan Terekap Dengan Baik 3.Presentase Pegawai Berkompetensi 4.Presentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Aset Dalam Kondisi Baik 5.Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100 % 100 %	100 % 100 %	Tidak ada permasalahan, capaian keuangan yang tidak 100% karena pengeluaran menyesuaikan kebutuhan	
1.				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	100%	-	
1.1				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Kegiatan	1 Dokumen 1 Kegiatan	Capaian keuangan yang tidak 100 % antara lain karena : - Kegiatan movev perencanaan ke	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					2. Penyusunan Dokumen Perencanaan 3. Penyusunan Renja Dinkes Brebes 4. Penyusunan Renstra Dinkes 2023-2026 5. Rapat Koordinasi PPK BLUD 6. Sosialisasi renstra	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	puskesmas hanya dilakukan sekali; - Pada saat pelaksanaan rapat-rapat, hanya diberikan snack saja tanpa makan siang	
1.2				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2. Penyusunan RKA Dinkes Brebes	1 Dokumen 1 Kegiatan	1 Dokumen 1 Kegiatan	-	
1.3				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2. Penyusunan RKA Perubahan	1 Dokumen 1 Kegiatan	1 Dokumen 1 Kegiatan	-	
1.4				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2. Penyusunan DPA	1 Dokumen 1 Kegiatan	1 Dokumen 1 Kegiatan	-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2. Penyusunan DPA	1 Dokumen 1 Kegiatan	1 Dokumen 1 Kegiatan	-	
1.6				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Buku Profil Kesehatan (Buku Saku) 3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan LPJ 4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan	1 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	-	
2.				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Keuangan Terekap Dengan Baik	100 %	100 %	-	
2.1				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Gaji	41 Dokumen	41 Dokumen	Permasalahan : - Untuk anggaran akresnya terlalu kecil	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<ul style="list-style-type: none"> - Jika terjadi pergeseran masih mengalami kesulitan - Anggarannya tidak bisa dibuat perbulan/ dibagi 12 bulan harus ditaruh di semester 1 semua - Tidak bisa melihat kendali belanja harus dibuat manual yang memungkinkan terjadinya kesalahan 	
2.2				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun	10 buah	10 buah	Tidak ada permasalahan, capaian keuangan yang tidak 100 % karena pengeluaran menyesuaikan kebutuhan	
3.				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN (%)	100%	100%	-	
3.1				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel) 2. Jumlah pakaian olahraga (stel)	Pakaian PSH = 127 Stel, Pakaian batik = 135 stel (dinas), 55 stel (RSU Ketanggungan) Pakaian olahraga = 130 buah	Pakaian PSH = 127 Stel, Pakaian batik = 135 stel (dinas), 55 stel (RSU Ketanggungan) Pakaian olahraga = 130 buah	-	
3.2				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat/pegawai (orang)	60 ASN	60 ASN	-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Presentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Aset Dalam Kondisi Baik 2. Tersedianya sarpras rumah tangga dan perkantoran Dinas Kesehatan	100% 100%	100% 100%	-	
4.1				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	7 jenis alat listrik, 3 jenis pemeliharaan instalasi	7 jenis alat listrik, 3 jenis pemeliharaan instalasi	-	
4.2				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	59 Jenis ATK dan materai	59 Jenis ATK dan materai	-	
4.3				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	11 jenis alat dan 7 jenis bahan kebersihan	11 jenis alat dan 7 jenis bahan kebersihan	-	
4.4				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	3 Jenis : makanan minuman pegawai, penjaga keamanan dan rapat	3 Jenis : makanan minuman pegawai, penjaga keamanan dan rapat	-	
4.5				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	13 Jenis	13 Jenis	-	
4.6				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis	-	
4.7				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan perjalanan luar daerah	330 Laporan	330 Laporan	Permasalahan : Keterlambatan pengklaiman dan ketidaklengkapan dokumen perjalanan dinas	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Solusi : Menegaskan kembali peraturan batas waktu pengumpulan dokumen perjalanan dinas	
5.				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) baru yang masuk dalam BMD SKPD (unit)	100%	100%	-	
5.1				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	<ul style="list-style-type: none"> - 25 Jenis ATK RSU Ktg - 21 Jenis alat Dapur RSU Ktg - 10 jenis perlengkapan RSU Ktg - 3 Jenis alat RT RSU Ktg - 7 jenis alat telemedicine - 42 jenis alat lainnya dan spanduk 	<ul style="list-style-type: none"> - 25 Jenis ATK RSU Ktg - 21 Jenis alat Dapur RSU Ktg - 10 jenis perlengkapan RSU Ktg - 3 Jenis alat RT RSU Ktg - 7 jenis alat telemedicine - 42 jenis alat lainnya dan spanduk 	Belanja penggandaan tidak dicairkan karena operasional RSU Ketanggungan dimulai akhir November 2022	
6.				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	100%		
6.1				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar (Buah)	20 buah surat	10 buah surat	-	
6.2				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	- Jenis Tagihan air 12 bulan	- Jenis Tagihan air 12 bulan	Anggaran Listrik RSU Ketanggungan disediakan sejak awal tahun, akan tetapi RSU Ketanggungan belum	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Tagihan telepon 12 bln - Jenis tagihan listrik 12 bulan - Jenis tagihan internet 12 bln 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Tagihan telepon 12 bln - Jenis tagihan listrik 12 bulan - Jenis tagihan internet 12 bln 	beroperasi secara penuh, dan pelayanan baru dilakukan akhir bulan November 2022, sehingga serapan anggaran sesuai kebutuhan	
6.3				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Dokumen Jasa Pelayanan 2. Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia / <i>cleaning service</i> (Orang)	150 Dokumen – 6 org CS DKK – 7 org CS RSU Ktg – 7 org satpam RSU Ktg	150 Dokumen – 6 org CS DKK – 7 org CS RSU Ktg – 7 org satpam RSU Ktg	Pelayanan Rawat Inap RSU Ketanggungan belum operasional, sehingga serapan anggaran sesuai kebutuhan	
7.				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD SKPD dalam kondisi baik (%)	100%	100%	-	
7.1				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit) 2. Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit) 3. Jumlah mobil diproses surat perijinannya (Unit)	10 unit 1 unit 11 unit	10 unit 1 unit 11 unit	-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4. Jumlah motor diproses surat perijinannya (unit)	33 unit	33 unit		
7.2				Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik (Unit)	17 unit meja	8 unit meja dan 1 set sofa	-	
7.3				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	25 Unit AC, 25 unit printer, 23 unit computer, jaringan internet dan 4 paket CCTV	25 Unit AC, 25 unit printer, 23 unit computer, jaringan internet dan 4 paket CCTV	-	
7.4				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	6 unit gedung kantor	6 unit gedung kantor 1 unit halaman gedung	-	
II.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100%	100%	-	
1.				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Cakupan pelayanan gigi ibu hamil 2. Jumlah kecayakan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi 3. Presentase desa total coverage PIS-PK	100 % 100 % 100 %	98,06 % 100 % 100 %	Cakupan pelayanan gigi bumil belum mencapai target dikarenakan : - Kurangnya koordinasi dan integrasi antar ruang pelayanan di puskesmas; - Kurangnya sosialisasi kepada ibu hamil dan pendamping bumil; - Saat kunjungan ibu hamil ke poli gigi tidak dapat bertemu petugas karena	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								petugas hanya satu dan sedang tugas luar gedung atau berhalangan secara kedinasan; serta - Ibu hamil langsung pulang, tidak memeriksakan giginya karena alasan tertentu. Solusi dengan melaksanakan pendampingan terhadap Puskesmas dalam rangka penyuluhan dan sosialisasi kepada ibu hamil dan pendamping bumil untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut yang baik.	
1.1				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya : 1. Rehabilitasi Puskesmas Siwuluh 2. Renovasi Ruang Kerja Puskesmas Kluwut	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	Tidak ada permasalahan	
1.2				Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Mobil Ambulance Puskesmas Kluwut, Wanasari, dan Kersana	3 unit	3 unit	Tidak ada permasalahan dalam serapan anggaran, karena serapan menyesuaikan kebutuhan	
1.3				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik	Tersedianya : 1. Antropometri kit 2. Hepafilter	42 unit 2 unit 4 unit	42 unit 2 unit 4 unit	-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3. Mesin spray desinfectan				
1.4				Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya masker disposable	4.230 box	4.230 box	-	
2.				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100%	100%		
2.1				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Jumlah RS yang telah bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) dan puskesmas melalui Dinkes (rumah sakit) 2. Jumlah Faskes yang mengadakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3. Prosentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	14 RS 52 unit 96%	14 RS 52 unit 86,65%	Prosentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target karena masih adanya ibu hamil yang belum mau memeriksa kehamilannya pada kunjungan ke 4 dan adanya ibu hamil yang kunjungan kehamilannya ke 1 masuk dalam trimester 2. Upaya yang dilakukan untuk menanganinya adalah dengan edukasi ke masyarakat dan ibu melalui KIBBL (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir) dan Program Grebek Wong Meteng (Gerakan Brebes Kawal Wong Meteng)	
2.2				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Jumlah Faskes yang mengadakan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	52 Unit	52 Unit	- Capaian keuangan jampersal yang belum 100% karena adanya peralihan pengiriman	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					2. Prosentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	98%	99,71%	bantuan transport di beberapa puskesmas dari tunai menjadi non tunai.	
2.3				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Prosentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	98%	98,02%	-	
2.4				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Prosentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	94%	84,32%	Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk hadir di posyandu karena masih ada balita yang belum hadir di posyandu disebabkan masih takut adanya covid 19 Kegiatan yang akan dilakukan untuk menangulangnya dengan promosi pentingnya deteksi tumbuh kembang anak dan peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam penilaian antropometri dan pemenuhan alat antropometri	
2.5				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Prosentase anak usia dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	88%	88,09%	-	
2.6				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Prosentase penduduk usia produktif (15 – 59 th) yang mendapatkan deteksi dini faktor resiko PTM Puskesmas dan jaringannya sesuai standar	100%	51,46%	Permasalahan di prosentase serapan anggaran : 1. Dana DAK (BOK) di SIPD tertera Rp.10.737.781.000, sedangkan dana yang	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<p>disetujui oleh Kemenkes sebesar : Rp.5.490.240.000. Realisasi Keuangan dari dana yang tersedia adalah 83,90%, sedangkan realisasi fisik adalah 100%</p> <p>2. Dana APBD Murni tidak ada masalah serapan anggaran karena serapan menyesuaikan kebutuhan. Dari anggaran Rp.309.369000 terserap sebanyak Rp.257.587980 (91,51%)</p> <p>Permasalahan pada Capaian kegiatan sesuai dengan target SPM belum sesuai target 100% karena :</p> <p>a. Setengah tahun masih dalam kondisi pandemic Covid-19, sehingga kegiatan di masyarakat masih dibatasi, Solusi yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Posbindu Mobil, petugas yang mendatangi sasaran</p> <p>b. Jumlah Sasaran yang besar, sehingga SDM dan Logistik belum mencukupi, untuk</p>	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<p>pelaksanaan DDFR PTM sesuai standard Solusi yang dilaksanakan adalah, melibatkan peran serta masyarakat dan desa untuk pemenuhan logistic dan transport kader</p> <p>c. Jumlah SDM Pengelola Program P2PTM di Dinas hanya 1 orang dengan 3 indikator SPM dibidang PTM, dan banyak indikator diluar SPM, serta Program PTM diluar indikator PTM, sehingga program PTM belum bisa berjalan optimal.</p> <p>d. Jumlah SDM Pengelola Program P2 PTM di Puskesmas juga terbatas dan harus merangkap memegang program lain yang mungkin dianggap lebih penting sehingga program P2PTM di Puskesmas juga belum terlaksana ptimal</p> <p>e. Kesadaran Masyarakat untuk mengikuti deteksi dini faktor resiko</p>	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								penyakit tidak menular yang masih rendah karena merasa sehat. Solusi yang dilaksanakan adalah melakukan KIE kepada sasaran bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait.	
2.7				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Prosentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60%	61,72%	-	
2.8				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Prosentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	40,35%	<p>Tidak ada permasalahan dalam serapan anggaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan, Alokasi dana untuk Puskesmas, dan beberapa puskesmas tidak menggunakan dana alokasinya.</p> <p>Permasalahan pada Capaian kegiatan sesuai dengan target SPM belum sesuai target 100% karena:</p> <p>a. Setengah tahun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, Penderita takut untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan</p> <p>Solusi yang dilaksanakan adalah kunjungan rumah pada penderita Hipertensi</p>	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								b. Jumlah Sasaran yang besar, sehingga SDM kesehatan terutama dokter dan perawat belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sesuai standard Solusi yang dilaksanakan adalah meminta tambahan tenaga medis dan paramedis. c. Kesadaran masyarakat terutama keluarga penderita yang masih rendah untuk mendukung penderita untuk mau melaksanakan kunjungan ke faskes Solusi yang dilaksanakan adalah KIE kepada keluarga pasien saat melakukan kunjungan	
2.9				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Prosentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standard	100%	84,98%	Tidak ada permasalahan dalam serapan anggaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan, alokasinya. Capaian Kegiatan masih belum mencapai target SPM 100%. Karena : Permasalahan pada Capaian kegiatan sesuai dengan	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<p>target SPM belum sesuai target !00% karena:</p> <p>a. Setengah tahun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, penderita takut untuk berkunjung ke faskes.</p> <p>Solusi yang dilakukan adalah kunjungan rumah pada penderita Diabetes melitus</p> <p>b. SDM kesehatan terutama dokter dan perawat belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sesuai standard</p> <p>Solusi yang dilaksanakan adalah meminta tambahan tenaga medis dan paramedis.</p> <p>c. Kesadaran masyarakat terutama keluarga penderita yang masih rendah untuk mendukung penderita untuk mau melaksanakan kunjungan ke faskes</p> <p>Solusi yang dilaksanakan adalah KIE kepada keluarga pasien saat melakukan kunjungan</p>	
2.10				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	100%	64,65%	Capaian Kegiatan masih belum mencapai target SPM 100%. Karena :	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Gangguan Jiwa Berat sesuai standar			1. Koordinasi lintas sektor terkait kurang maksimal. 2. Masih adanya stigma dari masyarakat terhadap ODGJ membuat masyarakat enggan melaporkan ke faskes. Solusi : 1. KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dengan advokasi ke perangkat desa saat kunjungan ke keluarga ODGJ pasung. 2. Memaksimalkan TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) yang sudah terbentuk, sehingga wadah koordinasi penanganan ODGJ lebih meningkat.	
2.11				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Tuberculosis sesuai standart	SR TB SO : 95% CDR : 90% CNR : 218/100.000pddk TB/HIV : 65%	SR TB SO : 76,21% CDR : 94,76% CNR : 206 TB/HIV :35,7%	Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar sektor (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Diperwaskim) dalam penanganganan TB Solusi : meminta dukungan kepada pemangku kepentingan terkait dengan program TBC supaya semua lintas sektor dapat terlibat dalam penanggulangan TBC	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Prosentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar	100%	90,12%	Permasalahan di prosentase serapan anggaran yaitu Dana DAK Fisik di SIPD tertera Rp.728.000.000, sedangkan dana yang disetujui oleh Kemenkes sebesar : Rp.625.000.000. Realisasi Keuangan dari dana yang tersedia adalah 85,52%, sedangkan realisasi fisik adalah 100%	
2.13				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Luar Biasa (KLB)	Persentase desa terkena KLB (Kejadian Luar Biasa) yang ditangani <24 jam	100%	100%	-	
2.14				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	100%	100%	-	
2.15				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional (puskesmas)	38 Puskesmas	38 puskesmas	Tidak ada permasalahan dalam serapan anggaran dan Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, capaian keuangan 100%	
2.16				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. AFP Rate 2. Persentase hasil pemeriksaan kesehatan haji	≥ 2 per 100.000 penduduk < 15 th 90% 90%	2,55 per 100.000 penduduk < 15 th 100% 100%	-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3. Persentase puskesmas yang melaporkan kasus diare 4. Persentase penurunan kasus PD3I tertentu	13%	75%		
2.17				Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1. Jumlah desa total coverage PIS-PK 2. Jumlah pos kesehatan untuk Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan (poskes) 3. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) 4. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi 5. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan PIS-PK	297 desa 59 poskes 38 puskesmas 38 puskesmas 38 puskesmas	297 desa 66 poskes 38 puskesmas 38 puskesmas 38 puskesmas	Permasalahan di prosentase serapan anggaran : 1. Dana DAK Non Fisik (BOK Kabupaten) dengan anggaran sebesar Rp.276.346.800,- , terserap sebanyak Rp. 236.477.906,- Realisasi Keuangan dari dana yang tersedia adalah 85,57%, sedangkan realisasi fisik adalah 92,86%. - Permasalahan Anggaran DAK Non Fisik (BOK Kabupaten) tidak dapat terserap 100%, dikarenakan alat USG pada puskesmas uji coba telemedicine belum tersedia, sehingga anggaran jasa tele-konsultasi dr.spA dan sp.Og tidak dapat terserap. - Solusi yang dilaksanakan adalah Pengadaan USG di tahun berikutnya.	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2. Dana APBD Murni tidak ada masalah serapan anggaran karena serapan menyesuaikan kebutuhan. Dari anggaran Rp.373.031.040 terserap sebanyak Rp.342.193.510 (91,73%), sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 100%.	
2.18				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Prosentase Penemuan kasus Pneumonia pada balita 2. Angka penemuan kusta 3. CFR DBD 4. IR DBD	65% 0,5 0,56 55	52,1% 1,18 2,02 0,02	1. Program P2ISPA Tidak ada permasalahan dalam serapan anggran karena serapan menyesuaikan kebutuhan Cakupan Penemuan sudah mendekati target yang ditetapkan 2. Program P2Kusta, Permasalahan : Anggaran tidak terserap, karena tidak ada petugas/ penanggung jawab yang khusus untuk Program P2Kusta 3. <i>Case Fatality Rate (CFR)</i> DBD realisasi 2,02 dari target 0,56, belum mencapai target karena tingginya angka kematian demam berdarah pada tahun 2022 yang disebabkan	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								terlambatnya penanganan kejadian demam berdarah. Solusi : meningkatkan upaya kesehatan berupa perubahan perilaku (promotif) dan pencegahan (preventif)	
2.19				Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan	60.881 Jiwa	91.691 jiwa	Keterbatasan anggaran untuk pembiayaan Kesehatan masyarakat miskin Solusi : Penambahan anggaran untuk mencapai target	
2.20				Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah sekolah menengah Atas SMA sederajat yang dilakukan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dengan Metode ASSIST	2 sekolah	2 sekolah	Tidak ada permasalahan dalam serapan anggaran, karena serapan menyesuaikan kebutuhan Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
2.21				Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	a. Jumlah FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) non puskesmas yang mendapat sosialisasi akreditasi FKTP (FKTP) b. Jumlah puskesmas terakreditasi	175 FKTP 38 puskesmas	24 FKTP (Klinik) 38 puskesmas	- Tidak ada permasalahan dalam serapan anggaran, karena serapan menyesuaikan kebutuhan - Indikator Jumlah FKTP Non Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi akreditasi FKTP belum tercapai, dikarenakan mempunyai permasalahan:	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								1) Surat Edaran tentang status kegawatdarutan Covid-19 belum dicabut; 2) Belum ada petunjuk terbaru tentang Instrumen Standar Akreditasi FKTP Non Puskesmas; 3) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi akreditasi FKTP dilaksanakan dalam bentuk Workshop Persiapan Akreditasi Klinik, dengan sasaran adalah Klinik yang telah bekerjasama dengan BPJS	
2.22				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	80%	100%	-	
3.				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Kesehatan	100%	100%	-	
3.1				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1. Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan 2. Jumlah kegiatan pendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Kesehatan	2 dokumen 1 kegiatan	2 dokumen 1 kegiatan	-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Memberikan sosialisasi OSS	
4.1				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)/fasilitas kesehatan lain yang terverifikasi dokumen perizinan	13 Unit	16 unit	-	
III.				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	100%	93%	Ujian kompetensi fungsional belum dapat dilaksanakan karena ada aturan baru harus menunggu penilaian akreditasi penyelenggaraan ukom	
1.				Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	93%	Saat ini masih menunggu hasil penilaian akreditasi penyelenggara ukom untuk dapat melaksanakan ujian kompetensi bagi tenaga fungsional	
1.1				Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1. Dokumen Profil SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) 2. Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan perbelkes di puskesmas yang tersedia	100 %	100 %	-	
1.				Kegiatan Pemberian Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketersediaan obat dan perbelkes di puskesmas yang tersedia	95 %	100 %	-	
1.1				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1. Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, UMOT yang diawasi izinnya 2. Tindak lanjut dari pengawasan perizinan apotek, tok obat, toko alat kesehatan dan UMOT	135 dokumen 135 dokumen	135 Dokumen 135 dokumen	-	
1.2				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perijinan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	95 %	100 %	-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.				Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	67 %	100%	-	
2.1				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1. Dokumen rekomendasi izin edar makanan dan minuman 2. Sarana IRT yang berizin yang diawasi 3. Sertifikat Laik Sehat 4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 5. Sertifikat Produksi Pangan IRT 6. Jumlah PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) yang terverifikasi	220 Dokumen 15 Sarana 130 Sertifikat 300 Sertifikat 220 Sertifikat 80 unit	240 Dokumen 20 Sarana 135 Sertifikat 315 Sertifikat 250 Sertifikat 0	Untuk jumlah PIRT yang terverifikasi, sudah dilaksanakan kunjungan lapangan namun belum dapat diverifikasi di semua bagian karena masih ada bagian yang perlu perbaikan	
V.				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	100%	100%	-	
1.				Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan,	Jumlah Desa melaksanakan Sanitasi	297 desa	297 desa	-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Total Berbasis Masyarakat Jumlah Desa melaksanakan Upaya Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan menganggarkan dengan APBDes Kesehatan	126 desa	126 desa		
1.1				Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Cakupan Akses Jamban Sehat 2. Desa yang menganggarkan dg APBDes Kesehatan 3. Dokumen Pemeriksaan Kualitas Lingkungan (Air Bersih, Air Minum, Air Limbah) 4. Dokumen Pemetaan PHBS 5. Jenis Dokumen Profil Kesehatan Lingkungan (TP3, TPM, TTU, Air Bersih, Sanitasi Dasar, Rumah Sehat, Pengelolaan Sampah, Sarana Institusi) 6. Jenis Media Promosi 7. Jumlah Desa dengan Strata Desa Siaga Aktif Mandiri 8. Jumlah Desa yang melaksanakan STBM	100 % 126 desa 3 dokumen 1 dokumen 10 dokumen 9 Jenis 30 Desa 297 desa	100 % 126 desa 3 dokumen 1 dokumen 10 dokumen 9 Jenis 62 Desa 297 desa	- Jumlah Desa yang memiliki Dokumen RPAM belum memenuhi target, baru 45 desa karena dokumen RPAM belum <i>terupdate</i> . Solusi : melakukan monitoring oleh dinkes dan pendamping Tim RPAM oleh Sanitarian Puskesmas; - Jumlah POS UKK yang aktif belum memenuhi target, baru 62 pos karena tidak semua puskesmas mempunyai industry informal. Solusi : pembentukan secara maksimal bagi puskesmas yang wilayahnya memiliki Industri Informal.	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					9. Jumlah Desa yang memiliki Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum) 10. Jumlah Desa ODF 11. Jumlah POS UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang aktif 12. Jumlah puskesmas yang mampu mengelola limbah medis 13. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga 14. Jumlah Sarana Kesehatan yang Ramah Lingkungan 15. Jumlah sanitarian yang bersertifikat 16. Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 17. Strata Desa Siaga	297 desa 71 desa 84 Pos UKK 38 Pusk 38 Pusk 43 sarkes 85 orang 85 % 78%	45 desa 297 desa 64 Pos UKK 38 Pusk 38 Pusk 52 sarkes 100 orang 97,36% 100%		
2.				Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Media Promosi Kesehatan	9 jenis	9 jenis	-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jenis Media Promosi Strata Desa Siaga	9 jenis 78%	9 jenis 100%	-	

2. UPTD KP2K KABUPATEN BREBES

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	UPTD KP2K	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di wilayah kerja UPTD KP2K	100 %	99,30	Tidak ada permasalahan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dan target tercapai	
1.				Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	99,97%	1) Permasalahan : Tidak ada permasalahan. realisasi keungan disesuaikan dengan jumlah tagihan. 2) Solusi / Penyelesaian Disesuaikan dengan anggaran tahun sebelumnya	
1.1				Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis alat tulis kantor, matrai dan jasa pengiriman	100 %	99,97%	Target tercapai	
1.2				Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan makan minum dan pengisian elpiji	100 %	99,97%	Target tercapai	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3				Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis fotocopy, jilid dan cetak	100 %	99,95%	Target tercapai	
2.				Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang di wilayah kerja UPTD KP2K	100 %	99,09%	1) Permasalahan Tidak ada permasalahan. 2) Solusi / Penyelesaian Anggaran disesuaikan dengan tahun kebutuhan	
2.1				Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis tagihan yang dibayarkan untuk air listrik dan telepon	100%	98,29%	Target tercapai	
2.2				Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jenis pembayaran untuk tenaga pelayanan umum kantor	100%	99,26%	Target tercapai	
3.				Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat pemeliharaan barang di wilayah kerja UPTD KP2K	100%	99,84%	1) Permasalahan Tidak ada permasalahan. Realisasi keungan disesuaikan dengan besar dan frekuensi kerusakan mesin, serta tagihan dari penyedia jasa. 2) Solusi / Penyelesaian Anggaran disesuaikan dengan tahun sebelumnya.	
3.1				Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan proses	100%	100%	Target tercapai	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	perijinan dan pemeliharaan				
3.2				Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan	100%	99,65%	Target tercapai	
3.3				Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%	Target tercapai	
II.				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya sumber daya kesehatan	100%	100%	Tidak ada permasalahan pada program pemenuhan upaya kesehatan dan target terpenuhi	Tidak ada
1.				Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Tersedianya bahan habis pakai dan prasarana untuk memberikan pelayanan kesehatan	100%	100%	1) Permasalahan Tidak ada permasalahan 2) Solusi / Penyelesaian Anggaran disesuaikan dengan jumlah kebutuhan	
1.1				Sub Kegiatan : Pengadaan bahan habis pakai	Tersedianya barang habis pakai di UPTD KP2K	100%	100%	Target tercapai	
III.				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase dokumen perencanaan dan	100%	100%	Tidak ada permasalahan pada program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Tidak ada

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					laporan pelaksanaan tersedia				
1.				Kegiatan : Pelaksanaan sehat dalam rangka promotive/preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Jenis media promosi seperti radio spot, baliho, bendera, dll	100%	100%	1) Permasalahan Tidak ada permasalahan. Realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga. 2) Solusi / Penyelesaian Disesuaikan dengan anggaran tahun sebelumnya	
1.1				Sub Kegiatan : Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat	Jenis media promosi kesehatan	100%	100%	Target tercapai	

3. UPTD LABKESDA KABUPATEN BREBES

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	UPTD Laboratorium Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Survey kepuasan terhadap pelayanan perkantoran laboratorium kesehatan	85%	93,51%	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
1.				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rasio implementasi pelaksanaan administrasi keuangan	8 jam/hari	8 jam/hari	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
1.1				Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67%	100%	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	90,85%	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan d disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
2.1				Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	4 paket	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
2.2				Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	2 paket	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
2.3				Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	4 paket	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4				Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	2 paket	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
2.5				Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 dokumen	2 dokumen	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
3.				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang laboratorium kesehatan daerah	100%	94,63%	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	3 laporan	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	5 laporan	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
4.				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD SKPD dalam kondisi baik	100%	79,00%	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
4.1				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	2 unit	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
4.2				Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit	11 unit	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3				Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	5 unit	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
II.				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tersedianya fasilitas pelayanan laboratorium untuk UKM dan UKP kewenangan daerah di Kabupaten Brebes	100%	98,90%	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
1.				Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana prasarana, alkes, dan BMHP	3 paket	3 paket	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
1.1				Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1 paket	1 paket	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2				Sub Kegiatan: Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 paket	1 paket	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
2.				Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan laboratorium untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah/ Kabupaten Brebes	1 unit	1 unit	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
2.1				Sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 dokumen	3 dokumen	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
2.2				Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.				Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi di UPTD Labkes Kab. Brebes	1 sistem	1 sistem	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
3.1				Sub Kegiatan: Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	1 unit	2 unit	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
III.				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Alat kesehatan yang diverifikasi dokumen perizinannya	1 paket	1 paket	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
1.				Kegiatan: Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah alat kesehatan yang dipelihara dan dikalibrasi	1 paket	1 paket	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium	-

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kesehatan Kabupaten Brebes.	
1.1				Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	1 paket	3 paket	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
IV.				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Terlaksananya PHBS dalam rangka promotif preventif di UPTD Labkes Kab. Brebes	100%	91,55%	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-
1.				Kegiatan: Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Labkesda melaksanakan promosi kesehatan	1 unit	1 unit	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1				Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	2 dokumen	2 dokumen	Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.	-

4. BLUD UPTD PUSKESMAS TANJUNG

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UPTD PUSKESMAS TANJUNG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	9 puskesmas (Tanjung, Kemurang Wetan, Luwunggede, Bulakamba, Kluwut, Siwuluh, Losari, Kecipir, Bojongsari)	9 puskesmas (Tanjung, Kemurang Wetan, Luwunggede, Bulakamba, Kluwut, Siwuluh, Losari, Kecipir, Bojongsari)	Penerapan PPK-BLUD Puskesmas di Kabupaten Brebes belum optimal sehingga menghambat proses pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dengan penyelesaian melaksanakan pendekatan dengan pengambil kebijakan dalam memahami penerapan PPK BLUD di Puskesmas, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, BPKAD, dan BPKP dalam menerapkan sistem pada Badan Layanan Umum Daerah. Hambatan yang dihadapi karena kegiatan dalam hal ini menggunakan Anggaran DAK Non Fisik BOK Puskesmas sehingga membutuhkan Juknis yang diterbitkan oleh Kemenkes yang terlalu lama (setelah tahun anggaran berjalan) sehingga perencanaan program dan pelaksanaan tidak maksimal. Sering terjadinya perubahan kebijakan Juknis di pertengahan tahun membuat perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak maksimal.	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	9 dokumen	9 dokumen		

5. BLUD UPTD PUSKESMAS BREBES

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UPTD PUSKESMAS BREBES	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	9 puskesmas (Brebek, Kaligangsa, Kalimati, Pamaron, Jatibarang, Klikiran, Wanasari, Sidamulya, Jagalempeni)	9 puskesmas (Brebek, Kaligangsa, Kalimati, Pamaron, Jatibarang, Klikiran, Wanasari, Sidamulya, Jagalempeni)	-	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	9 dokumen	9 dokumen	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>Jumlah dokumen promkes, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promkes dan gerakan hidup bersih dan sehat</p>	<p>9 dokumen</p> <p>9 dokumen</p>	<p>9 dokumen</p> <p>9 dokumen</p>		

6. BLUD UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	9 puskesmas (Banjarharjo, Cikakak, Bandungsari, Jatirokeh, Larangan, Sitanggal, Ketanggungan, Cikeusal Kidul, Kersana)	9 puskesmas (Banjarharjo, Cikakak, Bandungsari, Jatirokeh, Larangan, Sitanggal, Ketanggungan, Cikeusal Kidul, Kersana)	-	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	9 dokumen	9 dokumen	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promkes, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	9 dokumen	9 dokumen		
				Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promkes dan gerakan hidup bersih dan sehat	9 dokumen	9 dokumen		

7. BLUD UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	5 puskesmas (Paguyangan, Winduaji, Sirampog, Tonjong, Kutamendala)	5 puskesmas (Paguyangan, Winduaji, Sirampog, Tonjong, Kutamendala)	Penurunan pendapatan di awal tahun anggaran menyebabkan realisasi belanja tidak mencapai target sehingga banyak belanja yang tidak bisa direalisasikan hingga akhir tahun anggaran. Solusinya adalah mengefisienkan anggaran dan menganggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya untuk belanja yang belum bisa direalisasikan di TA 2020	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	5 dokumen	5 dokumen	Perubahan Juknis BOK di tengah tahun anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya harus diubah sesuai juknis terbaru dan pencairannya menunggu perubahan anggaran menyebabkan realisasi keuangan menumpuk di akhir tahun. Solusinya adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak pengelola program BOK dalam proses penyerapan anggaran agar kegiatan bisa dilaksanakan sesuai target.	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Adanya menu insentif UKM pada juknis BOK yang baru ada di tengah tahun anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian kegiatan dan berpengaruh pada penyerapan	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promkes, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	5 dokumen	5 dokumen	anggaran di triwulan III. Solusinya adalah dengan mengubah menu kegiatan sesuai juknis terbaru serta melakukan percepatan penyerapan anggaran di TW IV agar sesuai dengan target	
				Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promkes dan gerakan hidup bersih dan sehat	5 dokumen	5 dokumen		

8. BLUD UPTD PUSKESMAS BUMIAYU

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	6 puskesmas (Bumiayu, Kaliwadas, Bantarkawung, Buaran, Salem, Bentar)	6 puskesmas (Bumiayu, Kaliwadas, Bantarkawung, Buaran, Salem, Bentar)	-	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6 dokumen	6 dokumen	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan,				-	

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promkes, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	6 dokumen	6 dokumen		
				Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promkes dan gerakan hidup bersih dan sehat	6 dokumen	6 dokumen		

LAPORAN PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

1. Anggaran terkait penanganan Covid-19

Anggaran dalam penanganan covid-19 antara lain bersumber dari :

- a. DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik, dengan rincian
 - BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Kabupaten sebesar Rp. 407.380.160,- dengan realisasi Rp 373.812.055,- (91,76%);
 - BOK Puskesmas sebesar Rp.1.894.440.440,- dengan realisasi Rp.1.648.383.740,- (87,01%).
- b. DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebesar Rp 842.445.000,- dengan realisasi sebesar Rp 785.340.000,- (93,22%).
- c. APBD sebesar Rp 133.875.000,- dengan realisasi sebesar Rp 131.775.000,- (98,43%).

2. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Brebes antara lain :

- a. Optimalisasi 3 T (*testing, tracing dan treatment*);
- b. Percepatan vaksinasi Covid -19;
- c. Sosialisasi protokol kesehatan 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak; Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas)
- d. Pemenuhan kebutuhan logistik dan pengawalan distribusi logistik;
- e. Pengadaan poster, leaflet, dan baliho/billboard covid 19;
- f. Sosialisasi tentang limbah covid 19 di masyarakat;
- g. Pertemuan evaluasi pengelolaan limbah medis covid 19 di faskes dan isoman (isolasi mandiri);
- h. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tingkat Kabupaten;
- i. Pembinaan pelacakan kontak kasus Covid-19 kepada Puskesmas hingga petugas tracer;
- j. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tingkat Kabupaten
- k. Peningkatan kapasitas bagi petugas surveilans/pengolah data di puskesmas dalam rangka *tracing* dan manajemen data;
- l. Peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak /tracer
- m. Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) dan *hand sanitizer* untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen kasus Covid-19 bagi petugas Puskesmas dan tracer;
- n. Penyediaan alat kesehatan seperti hepafilter, mesin spray desinfectan dan starter kit;

- o. Komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi tentang Covid-19;
- p. Penyelidikan epidemiologi kasus covid-19;
- q. Pelacakan kontak dan pemantauan harian selama karantina dan/atau isolasi oleh tracer dan/atau petugas puskesmas;
- r. Pemenuhan vaksin ibu hamil dan lansia;
- s. Pemenuhan sarana persalinan sesuai standar covid;
- t. Pelaksanaan kebijakan penanganan persalinan pada masa covid;
- u. Pembuatan group wa (*whatss app*) ibu hamil;
- v. Kunjungan rumah ibu hamil dan lansia beresiko;
- w. Pembentukan RS rujukan covid;
- x. Pemberian santunan sosial untuk lansia.

3. Koordinasi antar instansi :

- RSUD/RSU se Kabupaten Brebes
- Pendidikan
- Kementerian Agama
- Sekretariat Daerah
- dll